



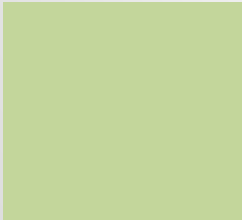
GISTARU DALAM MENJAWAB TANTANGAN ERA 4.0

Dalam Acara :
Senior Leaders Forum 2018
Enabling Indonesia 4.0

Shangri La Hotel, Jakarta, 23 Oktober 2018

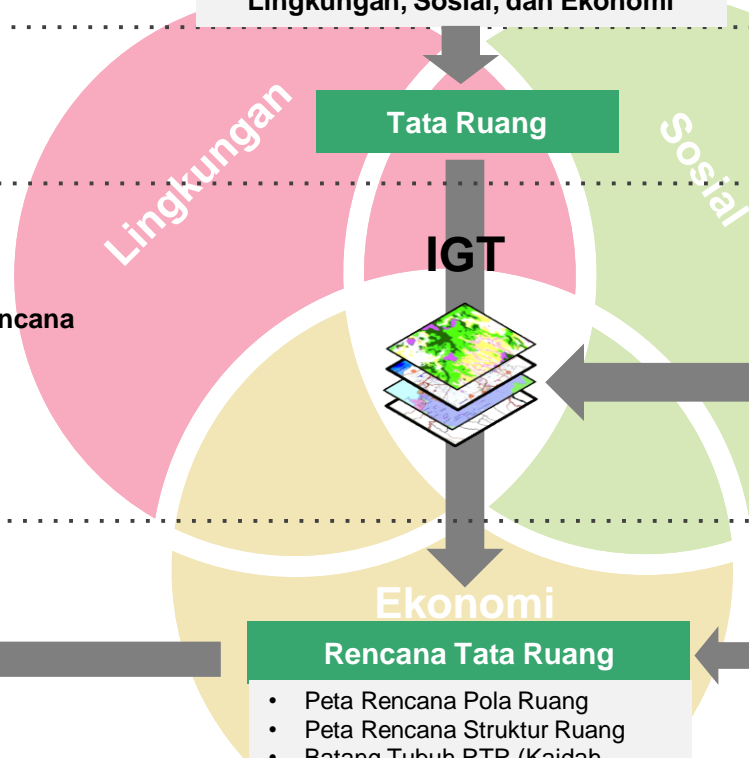


Aria Indra Purnama, ST, MUM
Direktur Perencanaan Tata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional





Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi



UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- PP 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

1. **Permendagri No. 13 Tahun 2016** tentang Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah
2. **Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2017** tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW
3. **Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2017** tentang Pedoman Pemberian Persub dalam rangka Penetapan Perda tentang RTR Prov/Kab/Kota
4. **Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyusunan RTRW Prov, Kab, dan Kota
5. **Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kab/Kota

Transparansi perlu dilakukan dalam **Proses Perencanaan** dan **Produk Rencana**

1. GIS TARU
2. Aplikasi RDTR Interaktif

- PP RTRWN
- Perpres RTR KSN
- Perda RTRW P/K
- Perda RDTR

Kesepakatan Stakeholders

- Rencana Tata Ruang**
- Peta Rencana Pola Ruang
 - Peta Rencana Struktur Ruang
 - Batang Tubuh RTR (Kaidah, Norma, KUPZ/APZ/PZ)
 - Indikasi Program
 - ITBX
 - Daftar KSN/KSP/KSK

- IGT (Tematik):**
1. IGT Jenis Tanah
 2. IGT Morfologi
 3. IGT Topografi
 4. IGT Muka Air Tanah
 5. IGT Kawasan Hutan
 6. IGT Wilayah Pertambangan
 7. IGT Lahan Baku Sawah
 8. IGT Infrastruktur
 9.dst



Rencana Tata Ruang menjadi **acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang** (izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, IMB) dan **menjadi pertimbangan dalam penerbitan izin sektoral lainnya** (izin lingkungan, IUP pertambangan, izin usaha pertambangan)

Proses Perizinan (UU 26/2007 & PP 15/2010)	Pengaturan Rencana Tata Ruang	Skala Peta
Pedoman Penetapan Lokasi dan Fungsi Ruang untuk Investasi	RTRW Nasional (PP No. 26 Tahun 2008 jo. PP 13/2017)	1 : 1.000.000
Pedoman Penetapan Lokasi dan Fungsi Ruang untuk Investasi	RTR Pulau/Kepulauan (Perpres)	1 : 500.000
Pedoman Penetapan Lokasi dan Fungsi Ruang untuk Investasi	RTRW Provinsi (Perda Prov)	1 : 250.000
Pengaturan Zonasi Pengembangan Kawasan	RTR Kawasan Strategis Nasional (Perpres)	1 : 150.000
Pengaturan Zonasi Pemanfaatan Ruang	RTR Kawasan Strategis Provinsi (Perda Prov)	1 : 50.000 1 : 25.000
Dasar penerbitan IMB, Izin Lokasi (langsung)	Rencana Rinci (Detail) Tata Ruang Kecamatan	1 : 5.000
Pemberian Izin Bangunan (Ketinggian, Bentuk)	Lembar Kerja / Urban Design Guideline (SK Kepala Dinas Tata Kota)	1 : 2.000

Perizinan terkait RTRW Kab/Kota, KSN, RDTR (Skala 1:50.000)

RTRW Kab/Kota, KSN dan RDTR digunakan sebagai **dasar Penerbitan Izin:**

- Izin Usaha Pertambangan
- Izin di bidang Transportasi
- Izin di bidang Ketenagalistrikan
- Izin di bidang Pekerjaan Umum
- Izin di bidang Perkebunan
- Izin Lokasi
- Izin Lingkungan
- Administrasi Pertanahan





UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 13 ayat (1) dan (2)

- 1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- 2) Pembinaan penataan ruang dilaksanakan melalui:
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - g. penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat;**

PP 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, **Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang** yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 9

- Bentuk pembinaan penataan ruang melalui:
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - g. penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat;**

PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 44

- 1) **Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR**, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak PP ini diundangkan **wajib menetapkan RDTR untuk Kawasan Industri atau kawasan usaha** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Rencana Tata Ruang

Rencana Umum Tata Ruang

(PP)

Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)

Skala Peta 1 : 1.000.000

Rencana Rinci Tata Ruang

(Perpres)

Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan
Skala peta 1 : 500.000

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional (RTR KSN)

(Perda)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP)

Skala peta 1 : 250.000

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi (RTR KSP)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota
(RTRWK)

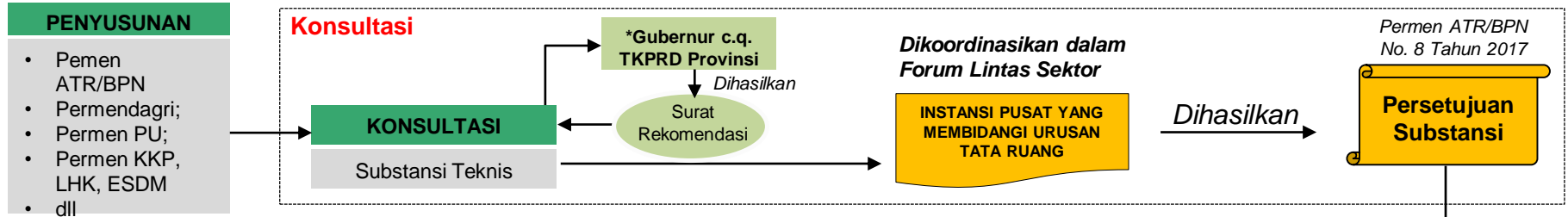
Skala peta 1 : 50.000 / 1:25.000

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kab/Kota (RTR KSK)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Skala Peta 1:5.000



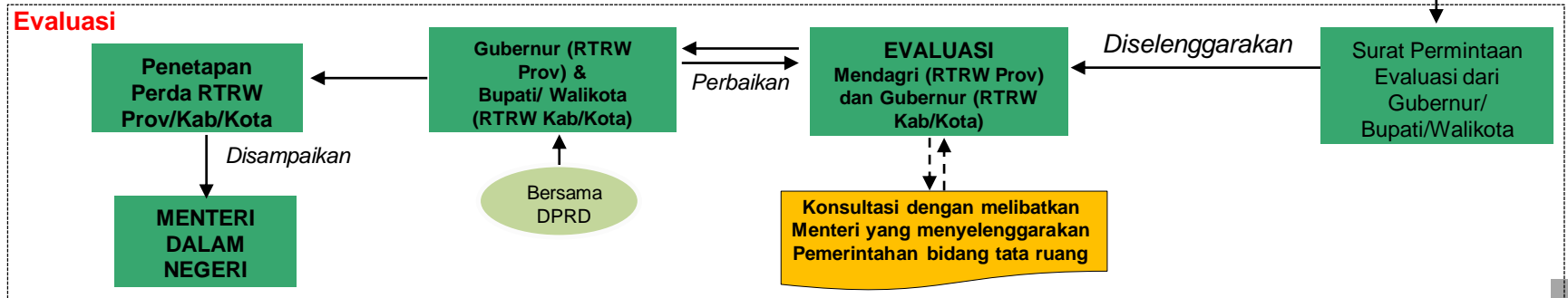
Penetapan Ranperda RTRW dan RRTR terlebih dahulu harus mendapat **persetujuan substansi** dari Menteri ATR/BPN.
(Pasal 18 ayat 1 UU 26/2007)



- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
- Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Perda tentang RTR Prov/Kab/Kota
- Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda RTR Daerah

RAPERDA yang telah disetujui DPRD diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota

Surat Permintaan Evaluasi dari Gubernur/Bupati/Walikota





17 - Tantangan Dunia

1. Kemiskinan
2. Kelaparan
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Kesamaan Gender
6. Air dan Sanitasi
7. Energi
8. Pekerjaan
9. Infrastruktur
10. Kesenjangan
11. Kota Berkelanjutan
12. Konsumsi Berlebih
13. Perubahan Iklim
14. Kehidupan di Air
15. Kehidupan di Darat
16. Perdamaian
17. Kerjasama

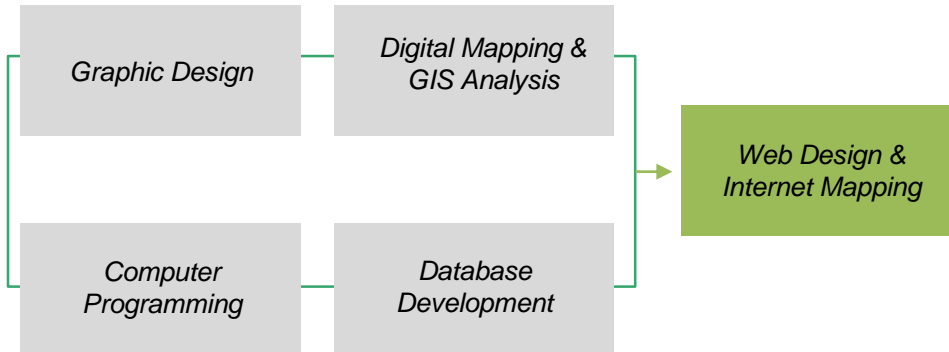
DISELESAIKAN



TERBUKA, TERINTEGRASI
DAN TERSTANDAR

GISTARU merupakan aplikasi *geographic information system* berbasis web untuk memberi kemudahan masyarakat untuk mengakses peta rencana tata ruang

Komponen Pembentuk Web GIS



Kemampuan Web GIS

- GIS yang berbasis web
- Aplikasi GIS (pemetaan) untuk pengguna di seluruh dunia.
- Tidak memerlukan software GIS.
- Tidak tergantung pada platform ataupun Sistem Operasi.
- Teknologi GIS yang dapat diterapkan pada aplikasi di internet.
- Pengaksesan data-data GIS dan fungsi-fungsi GIS melalui web.

Keuntungan Penggunaan Web GIS untuk Penyelenggaraan Tata Ruang



Murah



Data Terpusat



Mudah diakses



Dapat di hubungkan dengan K/L terkait



Menampilkan Semua peta RTR



Dapat Menampilkan Batang Tubuh dan Peta Evidence Perda



Mudah di Integrasikan dengan Sumber peta lainnya



Web GIS gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/ yang menampilkan Rencana Tata Ruang pada tingkat Nasional, KSN, Provinsi, Kab/Kota, dan RDTR yang disertai dengan file batang tubuh Perda, peta pola dan struktur ruang (jpeg), serta dilengkapi dengan bukti berita acara verifikasi peta.

The screenshot displays the Web GIS interface for the National Spatial Planning (Rencana Tata Ruang) system. The main map shows the Indonesian archipelago with a detailed view of Sulawesi Selatan. The interface includes a search bar, a layer list, and a metadata popup for a specific area.

Layer List:

- Operational layers
- _7000_PROVINSI_SULAWESI_PR_PERDA
- _7100_SULAWESI_UTARA
- _7200_SULAWESI_TENGAH
- _7300_SULAWESI_SELATAN

Metadata for _7300_SULAWESI_SELATAN:

Shape_Length	72.21
Shape_Area	0.98
Nama Objek	Kawasan Hutan Lindung
Name Provinsi	Sulawesi Selatan
Status Daerah	Perda
Status Data	Perda
Nomor dan Tahun Peraturan	Perda No. 09 Tahun 2009
Attachments:	01 7300_PP.pdf 02 7300_BA.pdf 03 7300_BT.pdf



RTRWN

RTRWN sudah terupload

KSN

17 dari 76 RTR KSN sudah terupload
(17 RTR KSN sudah Perpres)

PULAU

7 dari 7 RTR Pulau sudah terupload
(7 RTR Pulau sudah Perpres)

PROVINSI

34 dari 34 RTRW Provinsi sudah terupload
(34 RTRW Provinsi Perda)

KABUPATEN

361 dari 415 RTRW Kabupaten sudah terupload
(388 RTRW Kabupaten Perda)

KOTA

87 dari 93 RTRW Kota sudah terupload
(88 RTRW Kota Perda)

RDTR

31 dari 45 Perda RDTR sudah terupload

List RTRW Kab/Kota yang belum terupload



No	Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Status
1	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	Belum dikompilasi
2	Sumatera Utara	Kabupaten Tobasamosir	Belum dikompilasi
3	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Belum dikompilasi
4	Sumatera Selatan	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Belum dikompilasi
5	Lampung	Kabupaten Pesisir Barat	Proses Topologi
6	Jawa Barat	Kabupaten Pangandaran	Belum dikompilasi
7	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Proses Topologi
8	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	Proses Topologi
9	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	Proses Topologi
10	Kalimantan Tengah	Kabupaten Murungraya	Proses Topologi
11	Kalimantan Timur	Kabupaten Berau	Proses Topologi
12	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna	Proses Topologi
13	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Tengah	Belum dikompilasi
14	Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Belum dikompilasi
15	Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu	Belum dikompilasi
16	Papua Barat	Kabupaten Sorong Selatan	Belum dikompilasi
17	Papua Barat	Kabupaten Maybrat	Belum dikompilasi
18	Papua	Kabupaten Nabire	Belum dikompilasi
19	Papua	Kabupaten Paniai	Belum dikompilasi
20	Papua	Kabupaten Boven Digoel	Belum dikompilasi
21	Papua	Kabupaten Mappi	Belum dikompilasi
22	Papua	Kabupaten Yahukimo	Belum dikompilasi
23	Papua	Kabupaten Pegunungan Bintang	Belum dikompilasi
24	Papua	Kabupaten Sarmi	Belum dikompilasi
25	Papua	Kabupaten Waropen	Belum dikompilasi
26	Papua	Kabupaten Mamberamo Raya	Belum dikompilasi
27	Papua	Kabupaten Dogiyai	Belum dikompilasi
28	Papua	Kabupaten Deiyai	Belum dikompilasi



1. RDTR PZ Kaw. Perkotaan Sungai Liat & PZ 2014-2034 (Perda 15/2014)
2. RDTR PZ Kota Tasikmalaya (Perda 10/2016)
3. RDTR PZ Perkotaan Singaparna (Perda 9/2017)
4. RDTR Kaw. Perkotaan Kepanjen (Perda 5/2014)
5. RDTR dan PZ Kuta Selatan (Perda 7/2018)
6. RDTR Kota Bontang (Perda 1/2016)
7. RDTR Kawasan Emas Garongkong (Perda 1/2015)
8. RDTR Kawasan Perkotaan Sinjai (Perda 2/2018)
9. RDTR Kawasan Perkotaan Watampone (Perda 6/2017)
10. RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Poso (Perda 3/2015)
11. RDTR Tentena (Perda 1/2016)
12. RDTR Perkotaan Waibakul (Perda 8/2013)
13. RDTR Perkotaan Mbay (Perda 4/2017)
14. RDTR Kawasan Perkotaan Merauke (Perda 10/2016)



RTRWN

RTRWN sudah terintegrasi

PROVINSI

34 dari 34 RTRW Provinsi
sudah terintegrasi
(34 RTRW Provinsi Perda)

KSN

17 dari 76 RTR KSN sudah
terintegrasi
(17 RTR KSN sudah Perpres)

KABUPATEN

361 dari 415 RTRW
Kabupaten sudah terintegrasi
(388 RTRW Kabupaten Perda)

KOTA

87 dari 93 RTRW Kota sudah
terintegrasi
(88 RTRW Kota Perda)



Total Unique IP
13.528



Daily visitor
± 6.000



Total Visitor*
± 800.000

Visitor Map for Gistaru.atrbpn.go.id/rtronline

5,153 total visits for: Jul 1, 2018 - Aug 1, 2018



*Penghitungan sejak Launching GISTARU 7 Juli 2018

Selain GISTARU, Direktorat Jenderal Tata Ruang juga sedang mengembangkan RDTR Interaktif yang menampilkan informasi Perda RDTR dan disertai dengan fitur-fitur interaktif seperti simulasi penghitungan KDB dan KLB yang diperbolehkan pada suatu kawasan.

Contoh tampilan RDTR Interaktif sedang dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN.

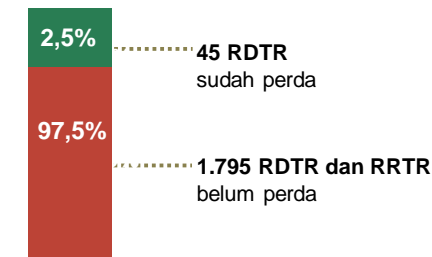
The screenshot displays the RDTR Interaktif web application interface. On the left, there is a sidebar menu with the following items: CITYPLAN, Peta RDTR, Hunian, Komersial, Industri, and Fasilitas Um... Each item has a corresponding icon. The main area shows a map with various colored zones and labels such as 'Jalan Citra prietas', 'SMA Negeri 2', 'Sarana Budaya Ganesha', 'Sarana Olahraga Ganesha (SARAGA)', and 'Babakan Siliwangi'. Three data panels are overlaid on the map:

- Panel 1 (Bottom Left):** Titled 'Aturan Bangunan', it shows 'Lokasi' (highlighted in red) as 'Sub Wilayah Kota Cibeunying' and 'Zonasi' as 'Kecamatan COBLONG'. It also lists 'Kelurahan Lebak Siliwangi'.
- Panel 2 (Center):** Titled 'Aturan Bangunan', it shows 'Lokasi' (highlighted in red) as 'Zonasi' and 'BANGUNAN'. It lists 'Kode Zona RTH1.5', 'Zona RTH Lindung Alami', 'Sub Zona RTH Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah eks. Situ', 'Bonus Zonasi -', 'Pengendalian Perkembangan Kota -', 'Kawasan Bandung Utara -', 'Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan', and 'Kawasan Cagar Budaya -'.
- Panel 3 (Right):** Titled 'Aturan Bangunan', it shows 'Lokasi' (highlighted in red) as 'Bangunan' and 'ZONASI'. It lists 'Bangunan Diizinkan' (Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Rusun Rendah, Panti jompo, Panti asuhan, Apartemen Rakyat, Rumah Dinas, Pusat Rehabilitasi, Pentipan Anak, Tempat bermain lingkungan, Taman, Perpustakaan, Puskesmas, Masjid, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Lapangan parkir umum, Gedung Parkir, Hutan Kota, Taman kota) and 'Bangunan Bersyarat' (Rusun Sedang, Rusun Tinggi (Apartemen), Asrama, Pemasaran Properti, Biro Perjalanan Wisata (tour and travel), Kebun Binatang, Kantor pemerintah kota / BUMD, Kantor Kecamatan / Kelurahan, Apotik) and 'Bangunan Terbatas' (Wisma, Rumah Kost, Warung, Toko, Pertokoan, Pusat transisi / menara telekomunikasi / pemancar telekomunikasi).



List Perda RDTR:

Status Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)



*Warna hijau= sudah terupload GISTARU

1. RDTR Kota Medan (Perda 13/2014)
2. RDTR PZ Kaw. Perkotaan Sungai Liat & PZ 2014-2034 (Perda 15/2014)
3. RDTR Muaro Sijunjung (Perda 1/2017)
4. RDTR Kota Payakumbuh 6 BWK (Perda 2/2018)
5. RDTR DKI Jakarta (Perda 1/2014)
6. RDTR dan PZ Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya (Perda 9/2014)
7. RDTR Kota Bandung 8 BWP (Perda 10/2015)
8. RDTR Kota Bekasi 5 BWP (Perda 5/2016)
9. RDTR PZ Kota Tasikmalaya (Perda 10/2016)
10. RDTR PZ Perkotaan Singaparna (Perda 9/2017)
11. RDTR Kota Yogyakarta (Perda 5/2014)
12. RDTR Tumpang Pitu (Perda 11/2015)
13. RDTR Wongsorejo (Perda 5/2016)
14. RDTR Banyuwangi & KSK Pelabuhan Ketapang (Perda 6/2016)
15. RDTR Kecamatan Kota Sumenep (Perda 3/2014)
16. RDTR Batuan, Rubaru, dan Manding (Perda 8/2016)
17. RDTR Kota Tulungagung (Perda 10/2016)
18. RDTR BWP Karangrejo – Ngantru (Perda 9/2016)
19. RDTR Bandungan, Pakel & Campurdarat (Perda 8/2016)
20. RDTR Kaw. Perkotaan Kapanjen (Perda 5/2014)
21. RDTR Gedeg (Perda 14/2015)
22. RDTRK Malang Tengah (Perda 2/2015)
23. RDTRK Sub Pusat Malang Utara (Perda 5/2015)
24. RDTRK Sub Pusat Malang Barat (Perda 4/2015)
25. RDTR Sub Pusat Malang Tenggara (Perda 3/2016)
26. RDTR Sub Pusat Malang Timur (Perda 4/2016)
27. RDTR Sub Pusat Malang Timur Laut (Perda 5/2016)
28. RDTR dan PZ Kuta Selatan (Perda 7/2018)
29. RDTR Kota Bontang (Perda 1/2016)
30. RDTR Kawasan Emas Garongkong (Perda 1/2015)
31. RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Masamba (Perda 6/2016)
32. RDTR dan PZ Kota Belopa (Perda 2/2016)
33. RDTR Panga (Perda 5/2016)
34. RDTR Kawasan Perkotaan Sinjai (Perda 2/2018)
35. RDTR Kawasan Perkotaan Watampone (Perda 6/2017)
36. RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Poso (Perda 3/2015)
37. RDTR Tentena (Perda 1/2016)
38. RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Parigi (Perda 7/2014)
39. RDTR Perkotaan Waibakul (Perda 8/2013)
40. RDTR Perkotaan Kalabahi (Perda 4/2017)
41. RDTR Perkotaan Waingapu (Perda 3/2017)
42. RDTR Perkotaan Mbay (Perda 4/2017)
43. RDTR Perkotaan Ende (Perda 10/2017)
44. RDTR Perkotaan Taliwang (Perda 12/2016)
45. RDTR Kawasan Perkotaan Merauke (Perda 10/2016)

Perda RDTR dalam Pelaksanaan OSS

Percepatan penetapan Perda RDTR dalam rangka mendukung pelaksanaan *Online Single Submission (OSS)*

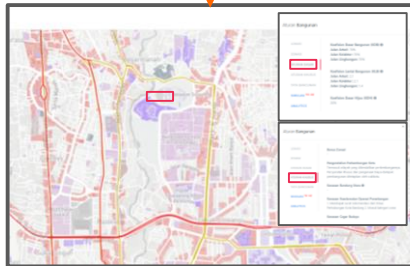
“Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib menetapkan RDTR untuk Kawasan Industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 44 ayat 1 PP 24/2018 tentang Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)

Investor dapat melakukan **input lokasi usaha yang diinginkannya** melalui sistem OSS yang akan terhubung dengan sistem webgis Kementerian ATR/BPN untuk mengecek kesesuaian dengan tata ruangnya

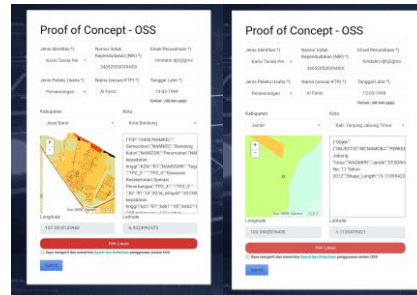


Berada pada lokasi yg memiliki RDTR

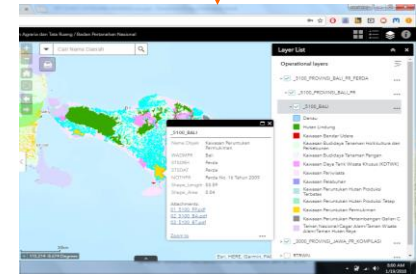
Berada pada lokasi yg belum memiliki RDTR



Pada daerah yang telah memiliki RDTR, sistem akan mengecek kesesuaian melalui webgis gistaru.atrbpn.go.id/rdrtrinteraktif



FORM OSS



Pada daerah yang belum memiliki RDTR, maka sistem akan mengecek kesesuaian terhadap RTRW Kab/Kota melalui webgis gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/

Terima Kasih



@DitjenTataRuang



@DitjenTaru



/DitjenTataRuang



Ditjen Tata Ruang



Tataruang.atr-bpn.go.id/



gistaru.atrbpn.go.id/rtronline